

Judul : Diskon tiket pesawat selama libur lebaran, Senayan apresiasi pemerintah ringankan beban masyarakat
Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Diskon Tiket Pesawat Selama Libur Lebaran **Senayan Apresiasi Pemerintah Ringankan Beban Masyarakat**

Senayan menyambut baik rencana Pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 17 hingga 18 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Diskon selama arus mudik dan balik Lebaran (14-29 Maret 2026) ini ditargetkan menjangkau 3,32 juta penumpang.

ANGGOTA Komisi VII DPR Hendry Munief menilai, kebijakan tersebut akan meringankan beban masyarakat yang merencanakan perjalanan selama masa libur lebaran 2026. Baik itu pulang kampung atau sekadar libur Lebaran. Terlebih, kebijakan tersebut diluncurkan di tengah kondisi ekonomi saat ini yang masih berat.

"Kebijakan ini jadi angin segar bagi masyarakat. Tentunya semua pihak akan menikmatinya," kata Hendry dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Diketahui, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen PU) Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyampaikan, rata-rata penurunan harga tiket pesawat berasal dari akumulasi sejumlah komponen biaya penerbangan pada Minggu (15/2/2026). Komponen tersebut yakni diskon 50 persen *Passenger Service Charge* (PSC), diskon 50 persen tarif Pelayanan Jasa Daratan, Penempatan, dan Penyimpanan

Pesawat Udara (PJP4U), serta penyesuaian fuel surcharge pesawat jet menjadi 2 persen dari sebelumnya 10 persen.

Sementara untuk pesawat *propeller*, fuel surcharge ditetapkan sebesar 20 persen. Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen serta menurunkan harga avtur sebesar 10 persen di 37 bandara. Maskapai yang terlibat dalam program diskon tiket pesawat ini antara lain Lion Air, Batik Air, dan Pelita Air.

Hendry menyarankan, Kementerian Pariwisata (Kempar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif memanfaatkan dan memaksimalkan kebijakan tersebut. Caranya dengan membuat program turunan seperti memberikan promosi destinasi yang menarik di setiap daerah. "Juga mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan kebijakan ini agar meraup keuntungan maksi-



Hendry Munief

mal," saran politikus PKS ini.

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga bisa mendorong pelaku UMKM seperti toko oleh-oleh memberikan insentif serupa sehingga wisatawan makin tertarik melakukan perjalanan wisata ke daerah mereka.

Berbeda, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut, program diskon tiket pesawat selama musim mudik dan balik lebaran 2026 itu tidak menyentuh akar persoalan. Hal itu cenderung menjadi solusi semu di tengah mahalunya harga tiket pesawat di Indonesia.

Dia bilang, tingginya harga tiket pesawat bukan semata-

mata disebabkan oleh kebijakan maskapai. Struktur kebijakan Pemerintah selama ini masih membebani industri penerbangan dan masyarakat sebagai pengguna jasa. "Penurunan harga tiket pesawat itu domain Pemerintah," tegas Lasarus dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Dia menyebut, ada banyak komponen kebijakan yang membuat tiket di Indonesia mahal dan ini tidak pernah diselesaikan secara serius. Setidaknya ada 3 faktor utama penyebab mahalnya harga tiket pesawat. Pertama, harga avtur di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan banyak negara lain, bahkan masih dikenakan pajak. "Kondisi ini ironis, mengingat avtur merupakan kebutuhan utama penerbangan dan seharusnya mendapat insentif," ucapnya.

Kedua, transportasi udara masih dikategorikan sebagai barang mewah, sehingga tiket pesawat dikenakan pajak barang mewah. Klasifikasi ini sudah tidak relevan dan bertentangan dengan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara.

"Bila pesawat masih dianggap barang mewah, jangan heran tiketnya mahal. Padahal bagi

masyarakat di banyak daerah, pesawat adalah satu-satunya akses mobilitas," keluh Lasarus.

Selain itu, pajak dan bea masuk suku cadang pesawat juga tinggi. Beban ini, otomatis mendorong naiknya biaya operasional maskapai yang pada akhirnya dibebankan kepada penumpang.

Bila Pemerintah serius, potong pajak avtur, hapus pajak barang mewah tiket pesawat, dan turunkan bea masuk *spare part*. "Dampaknya langsung ke harga tiket dan bukan diskon sesaat," tandas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) ini.

Lasarus mengatakan, kebijakan harga tiket pesawat yang mahal sudah masuk kategori meresahkan masyarakat. Sebab mereka dengan mudah membandingkan harga tiket di Indonesia dengan negara lain yang jauh lebih murah. Karena itu, kebijakan Pemerintah selama ini bersifat parsial, reaktif, dan musiman, bukan solusi struktural.

"Jangan hanya ramai saat lebaran dan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," pungkasnya. ■ TIF